

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH [LKIP] 2023



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA CIMAHI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi ini dapat tersusun.

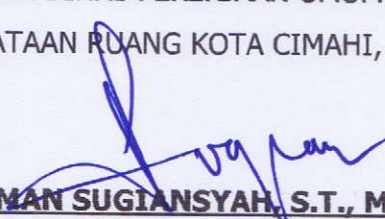
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cimahi ini disusun sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi Tahun 2023. Laporan ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja. Tujuan dari Laporan Penyusunan ini adalah untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang tercermin dalam system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun dan dilaporkan sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKIP ini berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi serta Perencanaan Strategis Kota Cimahi sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dengan mengacu Kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah .

Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Cimahi, Januari 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA CIMAHI,



WILMAN SUGIANSYAH, S.T., M.E.

Pembina Tk. I

NIP. 19790607 200502 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi Tahun 2023 menyajikan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Selama 1 (satu) tahun. Target Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis. Untuk mengetahui tingkat perubahan naik atau turunnya kinerja yang telah dilaksanakan dapat dilakukan dengan cara mengukur dan membandingkan pencapaian kinerja Tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2022. Selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya.

Target Kinerja tahun 2023 sebagian besar dapat tercapai. Adapun permasalahan yang menghambat tercapainya target kinerja, dapat diatasi dengan melakukan upaya-upaya solusi yang telah dilaksanakan.

Hasil capaian target kinerja memberi gambaran keberhasilan atau kegagalan Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi. Persentase capaian kinerja yang diukur dari Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Cimahi tahun 2023 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

**Persentase Rata -Rata Capaian Sasaran Kinerja
Tahun 2023**

No.	Sasaran	Persentase Rata – Rata Capaian
1.	Meningkatnya kemantapan jalan kota	95,12%
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas gedung pemerintahan	73,00 %
3.	Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana rinci tata ruang	62,20 %
4.	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	55

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Bab I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Isu Strategis	2
1.4. Jumlah Pegawai/ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5
1.5. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7
Bab II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8
2.2. Perjanjian Kinerja	8
2.3. Program Kegiatan dan Anggaran Yang Mendukung Perjanjian Kinerja	10
Bab III PENGUKURAN KINERJA	
A. Capaian Kinerja Anggaran	
3.1. Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11
3.2. Realisasi Capaian Kinerja Dengan Target Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 & 2023	12
3.3. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah (Renstra)	13
3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	13
3.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya	14
3.6. Analisis Program Atau Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	17
B. Realisasi Anggaran	18
C. Cross Cutting Program	30
D. Target Renstra DPUPR 2017 - 2023	31
Bab IV PENUTUP	32
Lampiran-lampiran :	
1. PK Eselon II	
2. RKT	
3. Tabel Pengukuran Kinerja	
4. SK. Tim LKIP	
5. Monev Rencana Aksi	

BAB I

PENDAHULUAN

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Strategi pembangunan Kota Cimahi adalah menumbuhkembangkan pembangunan diberbagai aspek kehidupan masyarakat dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, sehingga pembangunan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat bersama-sama dengan Pemerintah.

Pemerintah sebagai fasilitator pembangunan, memberikan ruang dan arah. Kebijakan ini perlu agar dapat menciptakan sistem pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien. Masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan, namun dilibatkan dan ditingkatkan peran sertanya dalam proses pembangunan agar terwujud suatu tatanan pemerintahan yang mantap yang memenuhi dinamika dan kebutuhan masyarakat.

Program pembangunan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dan berdasarkan skala prioritas pembangunan yang mengacu pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat kota dan diselaraskan dengan RPJMD. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tersebut diharapkan dapat mengurangi permasalahan - permasalahan kota serta semaksimal mungkin dapat memenuhi rencana pembangunan di Kota Cimahi.

Instansi Pemerintah mulai dari Pejabat Eselon II, III dan IV didalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan penggunaan sumber daya yang meliputi keseluruhan anggaran keuangan, waktu dan tenaga/SDM yang digunakan dalam memenuhi pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan perencanaan strategik yang telah dirumuskan sebelumnya.

Dalam hal ini, kinerja merupakan salah satu komponen dari prinsip "*Good Governance*" yang merupakan persyaratan bagi setiap unit kerja pemerintahan dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Seiring dengan hal tersebut, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangannya kepada semua pihak yang berkepentingan.

Sejak berlakunya Hal ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi yaitu :

1. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Surat Sekretaris Daerah Kota Cimahi No. 060/155/Org. Tanggal 17 Januari 2023 Penyampaian Dokumen SAKIP Perangkat Daerah dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

1.3. Isu Strategis

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk dilaksanakan dan diselesaikan, baik isu nasional maupun regional. Sesuai isu-isu strategis yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan, dituangkan dalam penyajian. Isu strategis merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan dan selanjutnya dijabarkan apa manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut.

Isu strategis berdasarkan dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk dilaksanakan. Adapun isu strategis bidang Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi adalah :

a. Penanganan Genangan di Ruas Jalan Kota

Permasalahan yang sering terjadi pada saat musim hujan tiba adalah genangan yang berada di ruas jalan kota, hal ini disebabkan karena terhambatnya aliran air yang berada di saluran samping jalan (drainase jalan). Akibat adanya genangan yang terjadi, sering menyebabkan kerusakan badan jalan dan kemacetan yang cukup panjang.

Terhambatnya aliran air terjadi karena dimensi saluran yang sudah tidak sanggup menampung, karena air yang masuk ke saluran samping tidak hanya dari

badan jalan, melainkan dari lingkungan sekitar, selain itu banyaknya sampah yang menyumbat aliran yang mengakibatkan air meluap dan menggenangi jalan.

Saluran samping jalan adalah saluran yang dibuat di sisi kiri dan kanan dari badan jalan yang berfungsi dan harus diperhitungkan mampu untuk:

- Menampung dan mengalirkan air hujan yang berasal dari permukaan perkerasan jalan.
- Menampung dan mengalirkan air hujan yang berasal dari daerah penguasaan jalan dan atau dari daerah pengaliran (*catchment area*) di sekitar saluran samping jalan.

Berdasarkan kondisi permasalahan yang terjadi, maka langkah strategis untuk mengantisipasi hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Kota Cimahi pada tahun 2023 melakukan Pembangunan dan perbaikan saluran samping diantaranya di ruas jalan:

- Jalan Babakan Loa
- Jalan Cisangkan
- Jalan Joyodikromo
- Jalan Karya Bakti
- Jalan Kebon Kopi
- Jalan Kerkof
- Jalan Lurah
- Jalan Margaluyu
- Jalan Melong Asih
- Jalan Rancabali
- Jalan Warung Contong

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Kota Cimahi juga melakukan pemeliharaan rutin seperti pengerukan sedimentasi dan pembersihan sampah terhadap saluran-saluran samping jalan yang sudah ada.

Selain melakukan perbaikan, pembangunan saluran, dan pemeliharaan rutin saluran samping jalan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi berkolaborasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Cimahi untuk mengatasi genangan-genangan yang ada di Kota Cimahi.

b. Kurangnya perawatan, pemeliharaan maupun penataan kembali sarana dan prasarana perkantoran pemerintah daerah Kota Cimahi

Permasalahan pelayanan terhadap masyarakat masih belum optimal dikarenakan sarana dan prasarana kantor yang masih kurang akan pemeliharaan, perawatan maupun penataan kembali ruangan kantor, dimana hal tersebut dapat

menambah keefektifan dalam pelaksanaan pemberian pelayanan kepada Masyarakat.

Dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan adanya sarana dan prasarana tentunya sangat membantu kelancaran serta efisiensi prosesnya. Pada dasarnya fungsi dari sarana dan prasarana bergantung pada penggunaan dan bidangnya. Secara umum sarana dan prasarana mempunyai fungsi utama yaitu :

- Mempermudah proses kerja;
- Mempercepat proses kerja;
- Meningkatkan produktivitas; dan
- Menghasilkan *output* yang berkualitas.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi pada tahun 2023 telah melaksanakan pemeliharaan, perawatan maupun penataan kembali sarana dan prasarana gedung perkantoran pemerintah daerah kota Cimahi.

c. Pembangunan yang tidak berizin dan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota Cimahi

Permasalahan pembangunan yang tidak memiliki izin dari pemerintah kota telah membuat wajah kota menjadi tidak teratur dan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan pengawasan dan pengendalian mengenai izin lokasi agar pembangunan di Kota Cimahi dapat disesuaikan kembali dengan arahan yang termuat di dalam RTRW Kota Cimahi. Maraknya pembangunan tanpa izin di Kota Cimahi diakibatkan oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait informasi tata ruang dan pentingnya perizinan dalam pembangunan.

Langkah strategis untuk menangani isu strategis di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Bidang Tata Ruang, pada tahun 2023 telah melaksanakan :

- Pelaksanaan monitoring kegiatan pembangunan secara berkala di Kota Cimahi oleh tenaga surveyor.
- Penindakan terhadap bangunan atau kegiatan pembangunan yang tidak memiliki izin maupun pembangunan yang menyalahi izin yang sudah disetujui. Pada tahun 2023 telah diterbitkan 151 surat peringatan. Penindakan ini menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran Masyarakat terkait perizinan pembangunan ini.

- Penerbitan Dokumen Penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) sebagai langkah awal untuk mengajukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pada tahun 2023 telah terbit 8 Dokumen Penilaian untuk PKKPR kegiatan berusaha dan 151 Dokumen Penilaian untuk PKKPR Non Berusaha.
- Penerbitan Dokumen Pertimbangan Teknis (Pertek) Tata Ruang sebagai pelengkap untuk PKKPR Otomatis terkait Arahan Tata Ruangnya, agar dapat mengajukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pada tahun 2023 telah terbit 184 Dokumen Pertimbangan Teknis (Pertek) Tata Ruang.
- Pelaksanaan konsultasi untuk persiapan Persetujuan Substansi di Direktorat Jendral Tata Ruang Kementerian ATR/BPN untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cimahi. Dimana RTRW Kota Cimahi ini menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan tata ruang kota.

Penyusunan ketentuan teknis untuk muatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Cimahi. RDTR merupakan rencana tata ruang yang lebih rinci dari RTRW, sehingga diharapkan arahan tata ruang akan lebih jelas lagi.

1.4. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 207 Tahun 2016). Perangkat Daerah dibentuk dengan memperhatikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5. Jumlah Pegawai/ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi

Pada saat ini Dinas PUPR Kota Cimahi didukung oleh pegawai berjumlah 79 orang, yang terdiri dari :

- | | |
|---|----------|
| 1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak | 42 orang |
| 2. Pegawai Tenaga Harian Lepas sebanyak | 37 orang |

Jumlah pegawai berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

**DAFTAR PEGAWAI DINAS PUPR BERDASARKAN
PANGKAT/GOLONGAN TAHUN 2023**

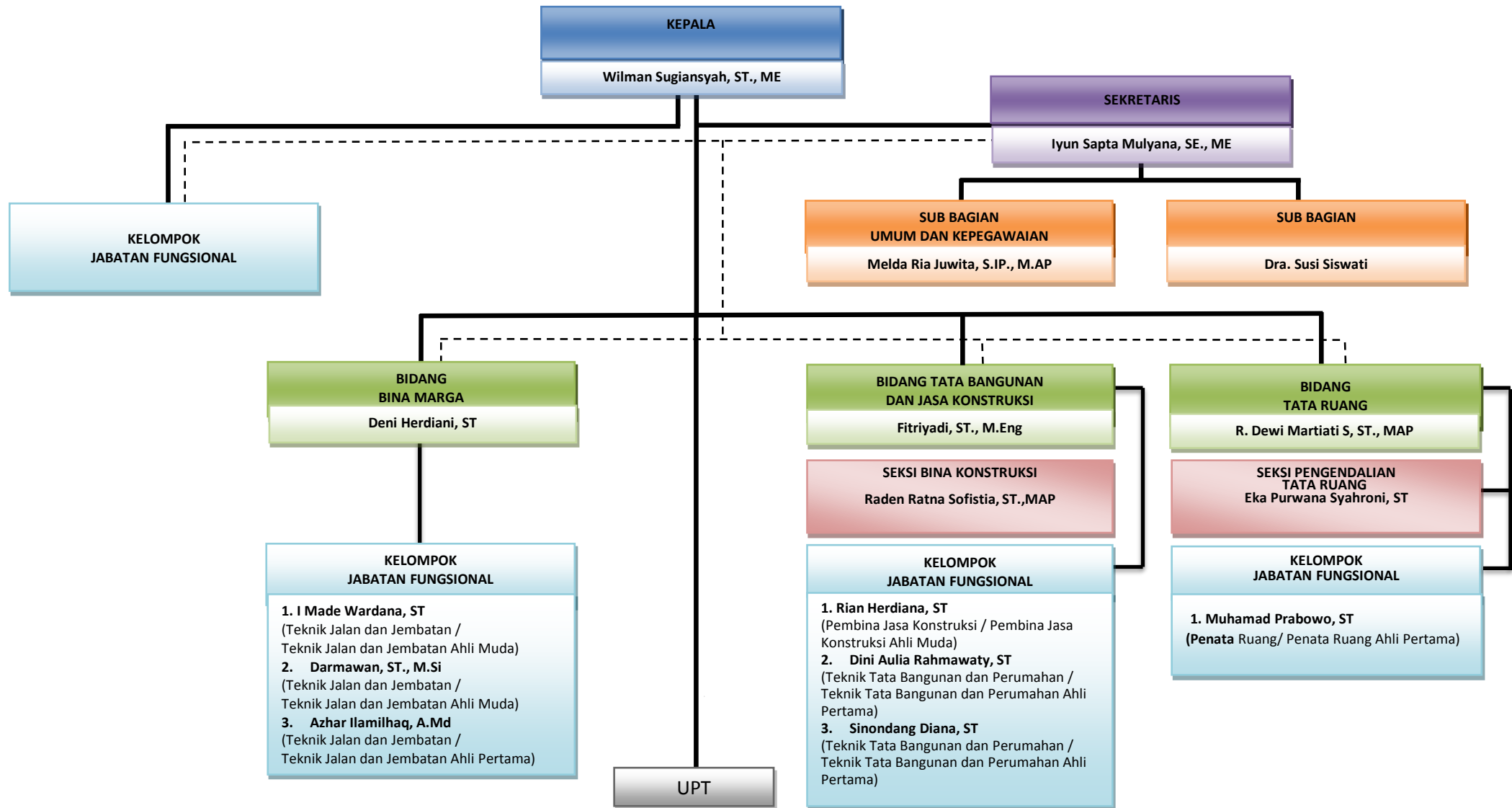
No	Golongan	A	B	C	D	Jumlah
1	IV	3	2	0	-	5
2	III	14	3	4	10	31
3	II	-	1	1	4	6
4	I	-	-	-	-	-
Jumlah						42

Tabel 1.2

**DAFTAR PEGAWAI DINAS PUPR BERDASARKAN
TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2023**

No	Pendidikan	PNS	Tenaga Harian Lepas	Jumlah
1	SD		25	25
2	SLTP	1	1	2
3	SLTA	7	3	10
4	DIPLOMA	3	1	4
5	S1	23	7	30
6	S2	8	-	8
7	S3	-	-	-
Jumlah		42	37	79

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA CIMAH



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

B A B II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya kemantapan jalan kota	Persentase tingkat kemantapan jalan kota	Kapasitas jalan sampai dengan tahun n-1 ditambah penambahan kapasitas jalan tahun n	95,12 %
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas gedung pemerintah kota	Persentase bangunan pemerintah kota dalam kondisi baik	Persentase bangunan sampai dengan tahun n-1 ditambah penambahan prosentase bangunan tahun n	73,00 %
3	Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana rinci tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan dengan rencana rinci tata ruang	(Luas kawasan yang didirikan sesuai RTRW / Luas seluruh kawasan) x 100%	62,20 %
4	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	--	55

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui berbagai kegiatan tahunan.

Berikut adalah target pencapaian yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Strategis (Renstra) 2023 - 2026 untuk lingkup

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi pada tahun 2023 yang dituangkan dalam Perjannjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 :

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kemantapan jalan kota	Panjang penataan pembangunan underpass sriwijaya (km)	0,204 km
		Panjang jalan kota jalan dalam kondisi mantap (km)	101,336 km
		Panjang drainase jalan (km)	2,302 km
		Panjang trotoar jalan (km)	0,079 km
		Panjang jembatan kota dalam kondisi mantap (m)	2,661,50 m
		Jumlah ruas jalan yang di inspeksi	108 ruas
		Jumlah jembatan yang di inspeksi	28 ruas
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas gedung pemerintah kota	Jumlah Bangunan Gedung	1 unit
		Jumlah bangunan gedung yang direhabilitasi	2 unit bangunan
		Jumlah tukang disertifikatkan	20 orang
		Jumlah peserta sosialisasi	20 orang
		Jumlah Verifikasi Bangunan Pemerintah untuk Dikaji Laik Fungsi	2 unit bangunan
3	Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana rinci tata ruang	Jumlah dokumen kebijakan	2 dokumen
		Frekuensi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang	12 bulan
		Jumlah pemantauan pelaksanaan ijin pemanfaatan ruang	40 berkas
4	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	55

2.3. Program/Kegiatan dan Anggaran yang mendukung Perjanjian Kinerja

Selanjutnya kami sampaikan program dan anggaran yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Cimahi tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Utama Kota Cimahi, dengan Jumlah belanja langsung sebesar **Rp. 65.157.826.559,-** atau **95,82%** dari total SKPD pada Tahun 2023 sebesar **Rp. 62.432.476.313,-** dan untuk capaian kinerja **99,08%**

Dalam rangka mencapai target-target tersebut, telah dirancang rincian Program dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi pada Tahun 2023 sebagai berikut :

NO :	PROGRAM :	ANGGARAN :
		Rp. 65.157.826.559
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.709.751.135
2	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 37.606.782.822
3	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 15.021.728.995
4	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 854.834.150
5	Program Penyelenggaraan Penataaan Tata Ruang	Rp. 2.964.729.457